

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk diantaranya melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah suatu upaya dilakukan manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilandalam keluarga tidak melawan hukum danmoral pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Melalui program KB akan terjadi pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga. Pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dalam pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi juga berkaitan dengan pemberian Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) kepada akseptor (Maritalia, 2017). Penggunaan alat kontrasepsi harus diputuskan dengan baik, dengan melihat kebutuhan, keuntungan dan efek samping dari pemakaian. Pendidikan, tingkat pengetahuan, pekerjaan, sikap, jumlah anak (paritas), dan dukungan suami merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Penggunaan alat kontrasepsi berhubungan dengan dukungan suami atau persetujuan pasangan (Bernadus, 2016). Pentingnya kualitas konseling masalah kontrasepsi oleh setiap tenaga kesehatan khususnya bidan dan para dokter harus ditingkatkan. Karena masih banyak ibu muda yang sudah mempunyai anak, belum paham kontrasepsi apa yang harus digunakan pasca melahirkan. Mereka sangat kurang mendapat informasi tentang kontrasepsi, sehingga dengan adanya konseling sejak dini, para ibu hamil telah diberikan pengetahuan tentang alat

kontrasepsi yang digunakan atau dipilih kelak setelah melahirkan anak (Andalas, 2017)

Menurut WHO, hampir 380 juta pasangan menjalankan keluarga berencana dan 65-75 juta diantaranya terutama di negeri berkembang menggunakan kontrasepsi hormonal yaitu pil KB (Firjanah, 2013). Berdasarkan data BKKBN tahun 2021 jumlah cakupan KB di Indonesia sebesar 43,2 % (BKKBN, 2021). Cakupan kesertaan KB pasca salin dan pasca keguguran tahun 2018 masih rendah, dari data persalinan di Rumah Sakit sebanyak 4.097 sedangkan yang menggunakan alat kontrasepsi hanya 1.105 akseptor atau 25% dari 4.097 persalinan (BKKBN, 2021). Data cakupan dan proporsi KB pasca persalinan menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 dari 15.586 ibu bersalin hanya 7249 (46,5%), didapat 5,577 (82,5%) peserta KB suntik, 683 (9,4%) peserta KB Pil, 255 (3,5%) AKDR, MOW 171 (2,4%), Implan 163 (2,2%) (Profil Kesehatan Jatim Tahun 2021). Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada tanggal 1-5 Oktober 2023 pada 10 ibu Post Partum di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dari 10 orang ibu post partum didapat 7 orang (70%) masih mengalami kesulitan (bingung) dalam menentukan metode kontrasepsi dan 3 orang (30%) sudah dapat memilih metode kontrasepsi yang akan digunakan. Hal ini tidak hanya karena keterbatasan metode yang tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk status kesehatan, efek samping potensial, konsekuensi kegagalan atau kehamilan yang tidak diinginkan, besar keluarga yang

direncanakan, persetujuan pasangan bahkan norma budaya lingkungan dan orang tua.

Konseling tentang kontrasepsi penting dilakukan karena masih banyak ibu muda yang sudah mempunyai anak, belum paham kontrasepsi apa yang harus digunakan pasca melahirkan. Mereka sangat kurang mendapat informasi tentang kontrasepsi, sehingga dengan adanya konseling sejak dini, para ibu hamil telah diberikan pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang digunakan atau dipilih kelak setelah melahirkan anak (Andalas, 2017). Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, BKKBN mengembangkan berbagai strategi, di antaranya memberikan layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat. Kualitas konseling dalam pelayanan KB yang terjadi di masyarakat kurang optimal. Konseling diberikan hanya sesuai dengan pertanyaan atau masalah yang di hadapi akseptor saja. Selain itu kurangnya pemanfaatan media atau alat bantu saat konseling. Sehingga tingkat pengetahuan akseptor cenderung kurang atau rendah (Jiwantoro, 2019). Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan dengan Media (ABPK) KB saat memberikan koseling tentang Penggunaan jenis kontrasepsi . ABPK Ber KB dapat digunakan bidan sebagai panduan standar dalam pelayanan KB yang tidak hanya berisi informasi terkini seputar kontrasepsi atau KB namun juga berisi standar proses dan langkah konseling kontrasepsi berdasarkan hak klien pengguna kontrasepsi dan *informed choise*. Alat bantu Pengambilan keputusan juga mempunyai fungsi untuk membantu klien mengambil keputusan metode kontrasepsi., membantu pemecahan masalah dalam penggunaan kontrasepsi serta sebagai alat bantu kerja bagi bidan, menyediakan referensi atau info terkini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan KB Terhadap Pengambilan Keputusan ber KB di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan KB Terhadap Pengambilan Keputusan ber KB di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menjelaskan Penggunaan Media ABPK terhadap pengambilan keputusan ber KB di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Pengambilan Keputusan Ber-KB Sebelum Dilakukan Konseling dengan Media ABPK KB (*Pretest*) di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.
2. Mengetahui Pengambilan Keputusan Ber-KB Setelah Dilakukan Konseling dengan Media ABPK KB (*Posttest*) di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.
3. Mengetahui perbedaan pengambilan keputusan ber KB sebelum diberikan konseling (*Pretest*) dan setelah dilakukan konseling (*Posttest*) dengan Media

ABPK KB di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penggunaan media Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) terhadap pengambilan keputusan ber KB pada ibu postpartum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Responden

Menambah pengetahuan, sikap dan perilaku ibu post partum dalam penggunaan alat kontrasepsi di Ruang Camelia UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

2. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman penelitian dan pengembangan wawasan dan tambahan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti dalam kebidanan khususnya tentang pengaruh konseling Alat Bantu Pengambilan Keputusan KB dengan Penggunaan alat kontrasepsi.

3. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tentang kontrasepsi serta pentingnya konseling KB pada ibu post partum.